



AKUNTANSI PAJAK DEWANTARA

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA



JURNAL.USTJOGJA.AC.ID

PENGARUH KEBIJAKAN HUTANG TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL SEBAGAI VARIABEL MODERATING

(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode
2014-2017)

Teguh Erawati^{1*}
Roi Irawan²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta

*email: royirawan32@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of debt policy on tax avoidance with managerial ownership as a moderating variable. The population in this study were manufacturing companies registered in the 2014-2017 period. The total sample was 68 taken based on the criteria of the purposive sampling method. Data analysis using descriptive statistics, classic assumption test, simple linear regression, multiple linear regression and hypothesis testing using SPSS version 21.0. T test, debt policy has a negative effect on tax avoidance. Managerial ownership variables can moderate the influence of debt policy on tax avoidance.

INFO ARTIKEL

Diterima: 2020-01-11
Direview: 2019-01-22
Disetujui: 2019-03-14
Terbit: 2020-09-30

Keyword:

Debt policy; tax avoidance; managerial ownership

PENDAHULUAN

Pajak sebagai kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang (Darmawan, 2014 dikutip oleh Cahyono et al., 2016). Pemerintah terus berusaha meningkatkan penerimaan pajak, akan tetapi bagi perusahaan ini akan menjadi beban. Sehingga perusahaan berusaha memperkecil pembayaran pajak baik secara legal maupun illegal. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, sedangkan penggelapan pajak adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (Xynas, 2011 dikutip oleh Eksandy, 2017).

PT Rajawali Nusantara Indonesia melakukan berupaya penghindaran pajak dengan cara pemilik di singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. Pemilik tidak menanamkan modal tapi seolah-olah memberikan utang. Saat bunga dari utang PT RNI kepada pemilik dibayarkan akan diakui sebagai dividen oleh pemilik yang berkedudukan di Singapura. Jadi, Modalnya diakui sebagai utang untuk mengurangi pajak, agar perusahaan bisa terhindar dari kewajiban (Suryowati, 2016).

Menurut (Atari, 2016) kebijakan hutang adalah keputusan yang dapat menentukan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Kemudian, perusahaan akan memiliki kewajiban-kewajiban untuk mengembalikan pinjaman dan bayar biaya bunga secara periodik. Adanya

kewajiban tersebut membuat manager berupaya untuk meningkatkan laba sehingga dapat memenuhi kewajiban dari penggunaan hutang. Perusahaan tumbuh yang memiliki hutang lebih besar dengan asumsi bahwa perusahaan tersebut memiliki kondisi lebih baik dalam menjalani *financial distress* (Harwira, 2009 dikutip oleh Irawan et al., 2016). Sehingga dari jumlah hutang akan timbul beban bunga dan sekaligus berfungsi untuk mengurangi pembayaran pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan.

Kepemilikan manajerial merupakan persentase kepemilikan yang berhubungan dengan saham dan opsi yang dimiliki manajer dan direksi perusahaan. Pengambilan keputusan untuk meningkatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan harus diambil oleh seorang manajer dalam menjalankan bisnisnya (Brigham dan Houston, 2011 dikutip oleh Dewi dkk, 2018). Keputusan manajer untuk melakukan aktifitas penghindaran pajak merupakan salah satu masalah keagenan, penghematan pajak dari penghindaran pajak merupakan sumber pendanaan bagi perusahaan (C.S Armstrong et al 2012 dikutip oleh Eksandy, 2017). Dengan adanya kepemilikan manajer ingin meningkatkan nilai perusahaan dan akan mempengaruhi kekayaannya, maka seorang manajer memaksimalkan hutang perusahaan, dengan hutang tersebut akan menimbulkan bunga yang dapat menjadikan biaya perusahaan sehingga dapat memperlemah penghindaran pajak atau mengurangi pembayaran pajak perusahaan.

Teori Agensi

Teori agensi menurut Jensen dan Meckling, (2006:81 dikutip oleh Saifudin dan Yunanda, 2016), menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah permasalahan antara manajer dan pemegang saham. Hubungan keagenan tersebut terkadang menghasilkan masalah dengan manajer dan pemegang saham atau disebut konflik kepentingan. Masalah itu timbul karena pemegang saham dan seorang manajer berusaha ingin memaksimalkan kepentingannya masing-masing.

Trade –off theory

Trade-off theory menyatakan bahwa hubungan antara struktur modal dengan nilai perusahaan terdapat suatu tingkat hutang yang optimal. Menurut teori ini agar tercapai struktur modal yang optimal perusahaan perlu mengimbangi *agency cost of financial distress* dan *tax advantage of debt financial* (Harjito, 2011)

Implikasi *trade-off theory* menurut Brealey dan Myers (1991 dikutip oleh Mutamimah dan Rita, 2009) yaitu, perusahaan dengan resiko bisnis besar harus menggunakan lebih kecil hutang dibandingkan perusahaan yang mempunyai resiko bisnis rendah, karena semakin besar resiko bisnis dengan menggunakan hutang yang tinggi akan meningkatkan beban bunga sehingga akan semakin mempersulit keuangan perusahaan.

Packing Order Theory

Teori *packing order* menyatakan bahwa perusahaan melakukan keputusan pendanaan secara *hierarki* dari pendanaan internal ke eksternal. Urutan pendanaan dari yang bersumber dari laba ditahan, kemudian hutang dan akhirnya sampai pada penerbitan ekuitas baru yang artinya dimulai dari sumber dana dengan biaya termurah (Myers dan Majluf, 1984 dikutip oleh Harjito, 2011).

Secara singkat pendanaan menurut *pecking order theory* (1) perusahaan lebih menyukai *internal financial*. (2) Perusahaan menyukai target *dividend payout ratio* terhadap peluang investasi mereka. (3) Kebijakan deviden yang *sticky* ditambahkan *fluktuasi profitabilitas* dan peluang investasi yang tidak dapat diprediksi. (4) Jika pendanaan eksternal diperlukan, maka perusahaan akan menerbitkan sekuritas yang paling aman yaitu dimulai dengan penerbitan obligasi dan *alternative* yang paling akhir adalah sekuritas.

Penghindaran Pajak

Menurut Zain, (2007 dikutip oleh Saifudin dan Yunanda, 2016) penghindaran pajak dan penyelundupan pajak yang kesemuanya itu bertujuan untuk mengurangi pembayaran pajak. Penghindaran pajak adalah upaya mengurangi pajak pembayaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Pohan, 2013 dikutip oleh Saifudin dan Yunanda, 2016). Meskipun penghindaran pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut karena wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah

pajak terutangnya dengan mencari kelemahan peraturan perpajakan (Dewi, 2014 dikutip oleh Mayangsari, 2015).

Kebijakan Hutang

Kebijakan hutang adalah kebijakan yang dapat menentukan seberapa besar akan kebutuhan dana perusahaan yang dibiayai oleh hutang namun perusahaan akan memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman beserta beban bunga secara periodic (Atari, 2016). Kebijakan hutang menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari hutang yang mencerminkan semakin tinggi nilai perusahaan, kebijakan hutang merupakan penambahan jumlah hutang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga (Maria dan Tmmy, 2013 dikutip oleh Handayani, 2017).

Perusahaan yang menginginkan memaksimalkan pendanaan melalui hutang maka biaya hutang semakin tinggi, sehingga laba perusahaan akan berkurang namun disisi lain pembayaran pajak ikut berkurang sehingga perusahaan akan cenderung rendah untuk melakukan penghindaran pajak. Dari penelitian Zahirah, (2017) menunjukkan leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan (Dewinta dan Setiawan, 2016) menunjukkan leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun beda dengan pendapat dalam penelitian yang dilakukan (Pajriyansyah dan Firmansyah, 2017) menyatakan leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H1: kebijakan hutang berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan persentasi kepemilikan yang berkaitan dengan saham dan opsi yang dimiliki manajer dan direksi perusahaan (Brigham dan Houston, 2011 dikutip oleh Dewi et al., 2018). Manajer berwenang menggunakan kekuasaannya diperusahaan untuk membuat kebijakan yang strategis dilakukan dengan tujuan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan bertujuan untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham (Minnick dan Noga, 2010 dikutip oleh Amri, 2017).

Dengan kepemilikan manajerial mengambil keputusan memaksimalkan kebijakan hutang yang tinggi akan berdampak pada penghindaran pajak, karena dari hutang tersebut akan timbul beban bunga yang dapat mengurangi pembayaran pajak perusahaan. dari penelitian (Prasetyo dan Pramuka, 2013) dan (Amri, 2017) menunjukkan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Atari, 2016) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressive*. Berbeda pendapat dengan penelitian yang dilakukan oleh (Salamah, 2018) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H2: kepemilikan manajerial memperkuat pengaruh hubungan negatif kebijakan hutang terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan data sekunder pada laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terlisting di BEI tahun 2014-2017. Pengolahan pada penelitian ini menggunakan model statistic.

Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdapat tiga variabel. Meliputi variable independen yaitu kebijakan hutang, variabel dependen yaitu penghindaran pajak dan variabel moderating yaitu kepemilikan manajerial.

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2017. Jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 68. Sampel penelitian ditentukan dengan metode *purposive sampling* maka jumlah sampel pada penelitian ini adalah 17 perusahaan.

Definisi Operasional

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak sebagai variable dependen merupakan cara dalam mengurangi pembayaran pajak yang bersifat legal dan masih dalam batasan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengurangan penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan model *cash effective tax rate* (CETR) yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelumnya. Menurut (Amstrong dan Blouin, 2009 dikutip oleh Wijayanti & Merkusiwati, 2017) dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{pembayaran pajak}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

Kebijakan Hutang

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kebijakan hutang. Kebijakan hutang adalah keputusan manajemen perusahaan mengenai besar kecilnya pendanaan melalui utang sebagai sumber pembiayaan suatu perusahaan (Puspitasari dan Manik, 2016 dikutip oleh Mardiyati dkk, 2018). Tujuan lain diperlukannya suatu kebijakan utang adalah agar perusahaan dapat mengola dana perusahaan secara efektif (Mardiyati et al., 2018). Sehingga kebijakan menentukan hutang sesuai dengan keputusan manajer untuk kepentingan biaya perusahaan dan menentukan seberapa besar biaya perusahaan dibiayai oleh hutang. Kebijakan hutang dapat diukur dengan menggunakan rasio keuangan *debt to equity ratio* (DER) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}}$$

Kepemilikan Manajerial

Variabel moderating yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah proporsi saham yang dimiliki dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (Pujiati dan Widanar, 2009 dikutip oleh Zahirah, 2017), dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{KM} = \frac{\text{jumlah saham manajerial}}{\text{total saham yang beredar}}$$

Teknik Analisis

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sun, range, kurtosis dan skewness (Ghozali Imam, 2018:19). Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data yang ada dalam penelitian ini yang terdiri dari kebijakan hutang, kepemilikan manajerial dan penghindaran pajak.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam proses regresi. Variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal (Ghozali Imam, 2018:161). Dalam penelitian ini menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal atau tidak (Ghozali Imam, 2018:166). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:

H₀ : Data residual berdistribusi normal.

H_A : Data residual berdistribusi tidak normal.

Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi tersebut ditemukan adanya data korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi ada atau tidak multikolonieritas di dalam model regresi, dapat dilihat dari nilai VIF (*variance inflation factor*) dan nilai *tolerance*. Nilai

yang umum digunakan untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *Tolerance* ≤ 0.10 atau sama dengan nilai *VIF* ≥ 10 (Ghozali Imam, 2018:107). Jadi dalam penelitian menunjukkan nilai *tolerance* lebih dari 0.10 atau nilai *VIF* kurang dari 10 maka tidak adanya multikolonieritas dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi tersebut terjadi ketidak samaan data variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali Imam, 2018:137). Dalam penelitian ini akan menggunakan uji Glejser, uji ini seperti halnya Uji Park, Glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen (Gujarati, 2003 dikutip oleh Ghozali Imam, 2018:142). Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5% maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi (Ghozali Imam, 2018:111). Dalam penelitian ini akan menggunakan uji Durbin – Watson (DW test), uji ini digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel independen. Nilai DW lebih besar dari batas atas (du) dan kurang dari 4-du, maka dapat disimpulkan bahwa kita tidak bisa menolak H_0 yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif (lihat tabel keputusan) atau dapat disimpulkan terdapat autokorelasi (Ghozali Imam, 2018:112).

Pengujian Hipotesis

Uji Hipotesis 1

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi linier sederhana. Analisis regresi linier sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal dengan satu variabel independen dan satu variabel dependen (Sugiyono, 2012:261). Adapun persamaan untuk menguji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \varepsilon$$

Uji hipotesis 2

(Fruco and Shearon 1991 dikutip oleh (Ghozali Imam, 2018:231) mengajukan model regresi yang agak berbeda untuk menguji pengaruh moderasi yaitu dengan model nilai selisih mutlak dari variabel independen dengan rumus persamaan regresi. Berikut merupakan persamaan regresi pengujian hipotesis:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 Z_2 + \beta_3 (X_1 * X_2) + \varepsilon$$

Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Menurut (Ghozali Imam, 2018:98) uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel yang terikat.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali Imam, 2018:98). Dasar pengambilan keputusan dalam penelitian ini menggunakan taraf signifikan 5%.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel. Nilai koefisien determinasi yaitu diantara nol dan satu. Nilai R^2 yang

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang di butuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali Imam, 2018:97).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Subjek dan Objek Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang telah *go-public* tercatat dalam Bursa Efek Indonesia dan memiliki variabel-variabel yang diperlukan dalam penelitian ini. Perusahaan manufaktur dipilih karena perusahaan manufaktur merupakan salah satu wajib pajak yang sering difokuskan dalam pemeriksaan Direktorat Jendral Pajak karena diasumsikan memiliki laba tinggi yang harusnya pembayarannya juga tinggi (Prokasa, 2014 di kutip oleh N. L. P. Dewi & Noviani, 2017). Penelitian ini menggunakan sampel yang berupa laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur tahun 2014-2017. Perusahaan manufaktur berjumlah 17 perusahaan sehingga jumlah laporan tahunan yang ditelusuri sebanyak 68 laporan keuangan. Berikut tabel kriteria pemilihan sampel dan perusahaan yang digunakan sebagai sampel penelitian ini:

Tabel 1. Data Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2017	143
2	Perusahaan yang mengalami kerugian (laba negatif)	(42)
3	Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang asing	(10)
4	Perusahaan yang tidak memiliki data mendukung	(74)
Jumlah sampel		17

Sumber: Data sekunder diolah, 2019

Statistik Deskriptif

Deskripsi variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data berupa rata-rata (*mean*), *standar deviasi* dan jumlah sampel dari variabel kebijakan hutang, penghindaran pajak dan kepemilikan manajerial.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kebijakan Hutang	68	.079	5.152	.84614	.983759
Kepemilikan Manajerial	68	.0000093	.3384377	.047245106	.0696413667
Penghindaran Pajak	68	.034	9.893	.49498	1.212040
Valid N (listwise)	68				

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji statistic deskriptif pada tabel 2 telah diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa variabel kebijakan hutang dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan DER memiliki rata-rata sebesar 0.84614 dan deviasi standar kebijakan hutang 0.983759. Variabel kepemilikan manajerial memiliki rata-rata sebesar 0.047245106 dan deviasi standar 0.0696413667. Variabel penghindaran pajak yang diukur dengan CETR memiliki nilai rata-rata 0.49498 dan nilai deviasi standar 1.212040.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam proses regresi. Variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Dalam penelitian ini menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S).

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas 1-Sampel K-S

		Unstandardized Residual
N		68
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000

	<i>Std. Deviation</i>	.62914009
	<i>Absolute</i>	.107
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Positive</i>	.070
	<i>Negative</i>	-.107
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		.881
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.419
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,419 dan nilai *Kolmogorov-Smirnov* yaitu sebesar 0,881.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi tersebut ditemukan adanya data korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi ada atau tidak multikolonieritas di dalam model regresi, dapat dilihat dari nilai VIF (*variance inflation factor*) dan nilai *tolerance*. Nilai yang umum digunakan untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *Tolerance* ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-.877	.200		-4.394	.000		
<i>Kebijakan Hutang</i>	.718	.140	.837	5.120	.000	.397	2.521
<i>Kepemilikan</i>	.046	.032	.174	1.429	.158	.719	1.390
1 <i>Manajerial</i>							
<i>Kebijakan</i>	.121	.026	.767	4.717	.000	.401	2.495
<i>Hutang*Kepemilikan</i>							
<i>Manajerial</i>							

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4 dapat diketahui nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) pada variabel bebas yaitu kebijakan hutang dan kepemilikan manajerial memiliki nilai lebih kecil dari 10 (VIF < 10) dan *tolerance* masing-masing variabel diatas 0,1. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yaitu kebijakan hutang dan kepemilikan manajerial tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Bertujuan menguji apakah dalam model regresi tersebut terjadi ketidak samaan data variane dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila variane dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, disebut homoskedastitas dan jika berbeda disebut heteroskedastistas. Dalam penelitian ini akan menggunakan uji Glejser, uji ini seperti halnya Uji Park, Glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terdapat variabel independen. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5% maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.611	.133		4.589	.000
<i>Kebijakan Hutang</i>	.086	.093	.176	.924	.359
1 <i>Kepemilikan Manajerial</i>	.032	.021	.216	1.522	.133
<i>Kebijakan</i>	.033	.017	.369	1.944	.056
<i>Hutang*Kepemilikan</i>					
<i>Manajerial</i>					

a. Dependent Variable: ABS_RES

Hasil uji glejser dapat dilihat pada tabel 5 bahwa semua variabel yaitu variabel independen dan

variabel dependen mempunyai nilai signifikansi lebih dari 0,05. Maka dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson (DW Tets). Kriteria dengan tidak terjadinya autokorelasi jika $DU < DW < 4-DU$.

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.567 ^a	.321	.290	.64372	1.986

a. Predictors: (Constant), Kebijakan Hutang*Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel 6, nilai durbin Watson sebesar 1.986 yang lebih besar dari batas atas (DU) 1.7001 dan kurang dari (4-DU) 2.2999. sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

Uji Hipotesis

Hasil Uji Hipotesis H1

Hasil Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Tabel 7. Hasil Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.073	.108		-9.958	.000
Kebijakan Hutang	.234	.102	.272	2.301	.025

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Dalam tabel 7 menunjukkan bahwa nilai t hitung > t tabel yaitu 2,301 > 1,996 dengan nilai signifikan 0,025 < 0,05 dan koefisien β sebesar 0,234 dengan arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kebijakan hutang berpengaruh positif terhadap CETR atau kebijakan hutang berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis pertama yang menyatakan kebijakan hutang berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak terdukung atau H1 diterima.

Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Tabel 8. Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2.902	1	2.902	5.293	.025 ^b
Residual	36.182	66	.548		
Total	39.083	67			

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

b. Predictors: (Constant), Kebijakan Hutang

Pada tabel 8 menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 5,293. Apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel maka dinyatakan variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. F tabel pada penelitian ini adalah 3,99 yang menunjukkan bahwa nilai F hitung lebih besar dari pada F tabel yaitu 5,293 > 3,99.

Hasil Uji Koefisiensi Determinasi (R²)

Tabel 9. Hasil Uji Koefisiensi Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
-------	---	----------	-------------------	----------------------------

1	.272 ^a	.074	.060	.74041
---	-------------------	------	------	--------

a. Predictors: (Constant), Kebijakan Hutang

Berdasarkan output pada tabel 9, dapat diketahui bahwa nilai *adjusted R square* adalah 0,060. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas kebijakan hutang dapat mempengaruhi penghindaran pajak sebesar 6% sedangkan sebesar 94% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

Hasil Uji Hipotesis H2

Hasil Uji MRA

Tabel 10. Hasil Uji MRA

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-.877	.200		-4.394	.000
Kebijakan Hutang	.718	.140	.837	5.120	.000
1 Kepemilikan Manajerial	.046	.032	.174	1.429	.158
Kebijakan Hutang*Kepemilikan Manajerial	.121	.026	.767	4.717	.000

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Penelitian ini menggunakan model regresi berupa *moderated regression analysis* (MRA) atau uji interaksi. Pada tabel 10 menunjukkan hasil regresi sebagai berikut:

$$Y = -0,877 + 0,718 X_1 + 0,046 X_2 + 0,121 (X_1 * X_2) + \epsilon$$

Hasil tabel 10 hasil MRA menunjukkan bahwa variabel moderating kebijakan hutang_ kepemilikan manajerial memiliki nilai t hitung > t tabel yaitu 4,717 > 1,997 dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga signifikan dan nilai koefisien sebesar 0,121. Sehingga dapat disimpulkan variabel kepemilikan manajerial mampu memperkuat hubungan positif kebijakan hutang terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian H2 tidak terdukung atau ditolak.

Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik f)

Tabel 11. Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik f)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12.564	3	4.188	10.107	.000 ^b
	Residual	26.520	64	.414		
	Total	39.083	67			

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

b. Predictors: (Constant), Kebijakan Hutang*Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang

Pada tabel 11 menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 10,107. Apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel maka dinyatakan variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. F tabel pada penelitian ini adalah 3,14 yang menunjukkan bahwa nilai F hitung lebih besar dari pada F tabel yaitu 10,107 > 3,14.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 12. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.567 ^a	.321	.290	.64372

a. Predictors: (Constant), Kebijakan Hutang*Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang

Berdasarkan tabel 12 dijelaskan bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,290 atau sebesar 29% penghindaran pajak dipengaruhi oleh kebijakan hutang dan kepemilikan manajerial. Sedangkan sisanya sebesar 71% menggambarkan variabel-variabel lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengujian Hipotesis 1

Pengajuan hipotesis dalam penelitian ini untuk membuktikan pengaruh kebijakan hutang terhadap penghindaran pajak yang dilakukan dengan pengujian statistik. Pada tabel 7 dapat dilihat bahwa kebijakan hutang memiliki t hitung $>$ t tabel yaitu $2,301 > 1,996$ dengan nilai signifikan $0,025 < 0,05$ dan koefisiensi β $0,234$ dengan arah positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan hutang berpengaruh positif terhadap CETR atau kebijakan hutang berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 terdukung. Hal ini menunjukkan semakin tinggi kebijakan hutang perusahaan maka akan rendah praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mayangsari, 2015), (Jasmine, 2017) yang menghasilkan penelitian bahwasannya kebijakan hutang berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Dewinta & Setiawan, 2016) yang menunjukkan bahwa kebijakan hutang berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Beda dengan (Saifudin & Yunanda, 2016) yang menunjukkan bahwasannya kebijakan hutang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kebijakan hutang pada dasarnya lebih banyak digunakan perusahaan dari pada menerbitkan saham baru karena lebih aman (Darmawan, 2012 dikutip oleh Samosir, 2017). Apabila ada pajak penghasilan bagi perusahaan, maka penggunaan hutang akan meningkatkan nilai perusahaan karena beban bunga hutang adalah biaya yang mengurangi pembayaran pajak (Kurniasih, 2013 dikutip oleh Mayangsari, 2015). Perusahaan menggunakan hutang semakin tinggi maka perusahaan akan melakukan penghindaran pajak cenderung lebih rendah karena timbulnya beban bunga yang dibayarkan perusahaan akan mengurangi pembayaran pajak, sehingga dari tingkat hutang yang tinggi dapat memperkecil penghindaran pajak pada perusahaan (Indana, 2015).

Pengujian Hipotesis 2

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini untuk membuktikan kepemilikan manajerial memperkuat pengaruh negatif kebijakan hutang terhadap penghindaran pajak. Pada tabel 10 dapat dilihat bahwa besarnya t hitung $>$ t tabel yaitu sebesar $4,717 > 1,997$ dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dan nilai β sebesar $0,121$ kearah positif. Maka dapat disimpulkan kepemilikan manajerial memperkuat pengaruh hubungan positif kebijakan hutang terhadap penghindaran pajak sehingga H_2 tidak terdukung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memperkuat pengaruh positif kebijakan hutang terhadap penghindaran pajak. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Salamah, 2018) dengan hasil kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dikarenakan kepemilikan manajerial yang menginginkan kekayaan dengan meningkatkan nilai perusahaan akan memaksimalkan kebijakan hutang untuk berinvestasi yang nantinya akan berdampak pada pembayaran pajak perusahaan yang disebabkan dari hutang akan timbul beban bunga yang dapat mengurangi pembayaran pajak, namun kepemilikan manajerial mempunyai karakter *risk taker* berani mengambil resiko sehingga akan melakukan penghindaran pajak untuk membayar kewajiban hutang dan beban bunga.

Teori atribusi dalam mendukung kepemilikan manajerial memperkuat hubungan positif terhadap penghindaran pajak, yang berpandangan dalam teori ini mengacu tentang bagaimana seorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain dan dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal, misalnya sifat, karakter, sikap atau eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Fritz Heider, 1958 dikutip oleh Dhypalonika, 2018). Karakter *risk taker* akan lebih berani mengambil resiko karena adanya paham bahwa semakin tinggi seriko yang diambil akan semakin tinggi keuntungan yang akan diperoleh. Semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan tentunya mempengaruhi nilai perusahaan (MacCrimmon dan Wehrung, 1990 dikutip oleh Amri, 2017).

SIMPULAN

Variabel kebijakan hutang berpengaruh positif terhadap CETR atau berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang memaksimalkan hutang maka akan menimbulkan beban bunga tinggi, dari beban bunga dapat mengurangi pembayaran pajak sehingga perusahaan akan cenderung lebih rendah untuk melakukan penghindaran pajak. Hasil ini mendukung hasil penelitian

yang telah dilakukan oleh (Dewinta & Setiawan, 2016).

Variabel kepemilikan manajerial memperkuat hubungan positif kebijakan hutang terhadap penghindaran pajak. Dari hasil penelitian Salamah, (2018) mengungkap semakin besar kepemilikan manajerial, para manajer akan semakin berusaha meningkatkan nilai perusahaan.

REFERENSI

- Amri, M. (2017). Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Moderasi Diversifikasi Gender Direksi dan Preferensi Risiko Eksekutif Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 9(1), 1–14.
- Atari, J. (2016). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kebijakan Hutang Terhadap Tax Aggressive. *JOM Fekon*, 3(1), 1137–1149.
- Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER) dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing BEI Periode Tahun 2011 - 2013. *Journal of Accounting*, 2(2), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.3929/ethz-b-000238666>
- Dewi, D. K., Tanjung, A. R., & Indrawati, N. (2018). Analisis Pengaruh Free Cash Flow, Investment Opportunity Set, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kebijakan Hutang Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 26(2), 101–121.
- Dewi, N. L. P. P., & Noviari, N. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Sosial Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(1), 830–859.
- Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1613.
- Eksandy, A. (2017). DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *Competitive*, 1(1), 1–20.
- Ghozali Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, R. (2017). Pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015. *Edisi Kelima Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro*, 10, 72–84. Retrieved from <http://journal.maranatha.edu>
- Harjito, D. A. (2011). TEORI PECKING ORDER DAN TRADE-OFF DALAM ANALISIS STRUKTUR MODAL DI BURSA EFEK INDONESIA. *Jurnal Siasat Bisnis*, 15, 187–196.
- Indana, R. (2015). Pengaruh Kpemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Deviden dan Struktur Aset Terhadap Kebijakan Utang Perusahaan Manufaktur Yang Masuk Dalam Daftar EFEK SYARI'AH. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 136–165.
- Irawan, A., Arifati, R., & Oemar, A. (2016). Pengaruh Aset Berwujud, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan, Lama Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Hutang Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar DI Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2010-2014. *Jurnal of Accounting*, 2(2), 1–19.
- Jasmine, U. (2017). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Jom Fekon*, 4(1), 1786–1800.
- Mardiyati, U., Qothrunnada, Q., & Kurnianti, D. (2018). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Struktur Aktiva, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan Dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Utang Pada Perusahaan Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2012 – 2016. *JRMSI - Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*, 9(1), 105–124. <https://doi.org/10.21009/jrmsi.009.1.08>
- Mayangsari, C. (2015). Pengaruh kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, preferensi risiko eksekutif dan leverage terhadap penghindaranPajak (tax avoidance). *Jom FEKON*, 2(2), 1–15.
- Mutamimah, & Rita. (2009). Keputusan Pendanaan: Pendekatan Trade-off Theory dan Pecking Order Theory. *Jurnal Ekobis*, 10, 241–249.
- Pajriyansyah, R., & Firmansyah, A. (2017). PENGARUH LEVERAGE , KOMPENSASI RUGI FISKAL DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP. *Jurnal Univesitas Pandanaran*, (December), 432–459.
- Prasetyo, I., & Pramuka, B. A. (2013). Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris independen terhadap. *Jurnal Universitas Jenderal Soedirman*, 20(02), 1–15.
- Prasetyo, I., & Pramuka, B. A. (2018). Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan proporsi

dewan komisaris independen terhadap tax avoidance (Vol. 20). SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA.

- Saifudin, & Yunanda, D. (2016). Determinasi Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi WIGA*, 6(2), 131–143.
- Salamah, R. (2018). *Pengaruh good corporate governance terhadap penghindaran pajak perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di lq45*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Samosir, H. E. . (2017). Pengaruh Profitabilitas Dan Kebijakan Utang Terhadap Nilai Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (Jii). *Journal of Business Studies*, 2(1), 75–83.
- Sugiyono, P. D. (2012). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Suryowati, E. (2016). Terkuak, Modus Penghindaran Pajak Perusahaan Jasa Kesehatan Asal Singapura.
- Wijayanti, Y. C., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 20(ISSN : 2302-8556), 699–728.
- Zahirah, A. (2017). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Periode 2013-2015). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan. Fakultas Ekonomi . Universitas Riau.*, 4(1), 3543–3556.